



Optimalisasi Komunikasi Politik Kepala Desa Laweyan dalam Pengembangan BUMDes

(Studi Khusus Desa Laweyan Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo)

Fiky Yunus

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Panca Marga Probolinggo, Indonesia

*Penulis Korespondensi: fikkyyunus1887@gmail.com

Abstract. *Political communication is a process of conveying political messages involving political actors, government, power, and various activities within the political system. As a branch of communication science, political communication focuses on how political messages are constructed, delivered, received, and interpreted by the public, as well as how these processes influence public opinion and political decision-making. In the context of this study, the optimization of the village head's political communication in developing the Village-Owned Enterprise (BUMDes) can be seen through the policy directions undertaken, such as providing training for livestock farmers particularly goat farming and managing village deliberation meetings (musdes) that support the sustainability of BUMDes programs. This research employs a descriptive qualitative method conducted in Laweyan Village, Sumberasih Subdistrict, Probolinggo Regency, with data collected through observation, interviews, and documentation. Dan Nimmo's political communication theory serves as the analytical framework. The findings indicate that the Laweyan Village Government consistently strives to improve the community's economy through the development of BUMDes, particularly in the agricultural and livestock sectors. Innovations carried out by the village government and BUMDes management, especially within the goat farming unit, have significantly contributed to the progress and sustainability of the enterprise.*

Keywords: *Community Participation; Development of BUMDes; Head of Village; Optimization; Political Communication.*

Abstrak. Komunikasi politik merupakan proses penyampaian pesan politik yang melibatkan aktor politik, pemerintah, kekuasaan, serta berbagai aktivitas dalam sistem politik. Sebagai cabang ilmu komunikasi, komunikasi politik berfokus pada bagaimana pesan politik dibentuk, disampaikan, diterima, dan diinterpretasikan oleh publik serta bagaimana proses tersebut memengaruhi opini publik dan pengambilan keputusan politik. Dalam konteks penelitian ini, optimalisasi komunikasi politik kepala desa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terlihat melalui arah kebijakan yang diambil, seperti pemberian pelatihan kepada para peternak khususnya peternakan kambing serta pengelolaan musyawarah desa (musdes) yang mendukung keberlanjutan program BUMDes. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dilaksanakan di Desa Laweyan, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori komunikasi politik Dan Nimmo digunakan sebagai landasan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Laweyan secara konsisten berupaya meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan BUMDes, khususnya pada sektor pertanian dan peternakan. Inovasi yang dilakukan pemerintah desa bersama pengelola BUMDes, terutama pada unit usaha peternakan kambing, terbukti berkontribusi terhadap kemajuan dan keberlanjutan BUMDes tersebut.

Kata kunci: Komunikasi Politik; Kepala Desa; Optimalisasi; Partisipasi Masyarakat; Pengembangan BUMDes.

1. LATAR BELAKANG

Komunikasi politik ialah komunikasi yang melibatkan pesan serta aktor politik yang bersangkutan paut dengan kekuasaan pada pemerintahan dan juga yang mengenai kebijakan dalam pemerintahan. Maka oleh sebab itu dari komunikasi politik itu adalah bukan hal yang umum lagi, komunikasi politik juga kita bisa pahami yaitu dimana suatu komunikasi antara masyarakat dan pemerintah (LOPULALAN, D. L. (2023)).

Terutama komunikasi politik dipemerintah desa, sehingga dalam makna desa itu sendiri mencakup Tahir, M. I. (2012) mengutip dari (Soetardjo, 1984 : 15, Yulianti, 2003 : 24) kata desa berasal dari bahasa india yang berarti tempat asal, tempat tinggal, tempat leluhur atau negara asal yang merujuk dalam kesatuan hidup, norma, serta memiliki alasan yang jelas (Tahir, M. I. (2012). Sedangkan Marjiko, L. A., & Satria. (2020) mengutip dari H.A.W idjaja (2003) dalam bukunya yang berjudul “Otonomi desa” beliau menyatakan bahwa desa merupakan sebagian kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pememikiran mengenai pemerintah desa ialah otonomi asli, keanekaragaman, demokratisasi, partisipasi dan pemerdayaan pada masyarakat (Marjiko, L. A., & Satria. (2020). Sehingga dalam pengelolaan pemerintahan desa harus jelas serta memiliki seorang pemimpin atau kepala desa yang dimana sesuai dengan UU No 3 tahun 2024 tentang perbahan kedua dari atas UU No 6 tahun 2014 tentang desa, pasal 27 tentang dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban kepala desa.

Oleh karena itu kepala desa harus mampu mampu memberikan arahan dan membina dalam sebuah kebijakan terutama dalam pengembangan bumdes. Melihat Potensi yang dimiliki oleh Desa tersebut meliputi hewan ternak, hasil sawah, budidaya anggur dan jamur serta bambu yang menjadi tolak ukur dalam peningkatan ekonomi desa melalui BUMDES. Selain dari sektor potensi tersebut terdapat potensi lain yang dimiliki desa laweyan seperti potensi pariwisata serta potensi sumberdaya alam. Oleh sebab itu dalam pengembangan BUMDES ada beberapa yang perlu diperhatikan seperti dari mulai pelatihan dan pembinaan, peran masyarakat dalam pengembanagan BUMDES, kerjasama, serta inovasi dalam pengembangan BUMDES itu sendiri. Sehingga dalam pengelolaan baik dari potensi desa tersebut hal itu juga dapat memiliki peluang besar untuk penggerak dalam ekonomi yang ada di desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi angka kemiskinan. Namun dalam keterkaitan optimalisasi komunikasi politik kepala desa dalam pengembangan bumdes dapat dilihat dari arah kebijakannya seperti pengarahan dalam pelatihan para peternak terutama dalam peternakan kambing serta pengarahan dalam hal kegiatan musdes yang dimana mengarah pada keberlanjutan dalam program bumdes tersebut serta inovasi-inovasi dalam pengembangan. Sehingga BUMDES Desa Laweyan berfokus kepada pertanian dan ketanahan pangan tetapi peneliti lebih berfokus pada peternakan kambing dalam hal pengelolaan penggemukan dan pengembangbiakan. BUMDES tersebut dikelola oleh desa sendiri yang dimana kepala desa berperan sebagai penasehat sekaligus pengarah agar kebijakan dalam BUMDES tersebut berjalan dengan baik serta terarah. Sedangkan untuk pengelolaan pakan tersebut pihak BUMDES menggunakan fermentasi dalam pemberian pakan bukan menggunakan sentrat agar

kambing yang peternakan tersebut memiliki kualitas yang sangat bagus. Sehingga dalam hal penjualan peternakan ini banyak sekali distributor yang tertarik dengan adanya peternakan kambing tersebut, hal ini juga membuat pemerintah desa menjadi pendorong ekonomi masyarakat agar menjadi sejahtera. Namun permasalahannya terletak pada pengelolaan bahan pakan yang dimana mereka harus memberikan yang berkualitas baik jika tidak menggunakan pakan ternak yang baik makan akan berakibat pada kualitas kambing tersebut. Oleh karena itu penulis sangat tertarik dengan penelitian ini bagaimana optimalisasi komunikasi politik kepala desa laweyan dalam pengembangan bumdes.

2. KAJIAN TEORITIS

Haris, A. (2022) mengutip dari Dan Nimmo (2011) ia menjelaskan bahwa menurutnya komunikasi politik dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang dianggap komunikasi politik jika sesuai untuk mengatur manusia dalam konsekuensinya untuk mencegah dalam kondisi konflik (Haris, A. (2022).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Metode ini bertujuan memahami fenomena secara mendalam berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, serta deskripsi temuan yang diperoleh di lapangan selama proses penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu wawancara dengan narasumber terkait optimalisasi komunikasi politik Kepala Desa Laweyan dalam pengembangan BUMDes, observasi langsung di lokasi penelitian, serta telaah dokumen pendukung seperti jurnal, buku, dan sejumlah artikel yang relevan. Teknik-teknik tersebut digunakan untuk memperoleh data yang komprehensif dan mendukung analisis penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikator Politik

Dalam hal ini peran komunikator dalam politik pemimpin pemerintahan desa yaitu kepala desa beliau memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan dari mulai pengarahan atau penasehat hingga sebagai pembinaan. Sehingga dalam optimalisasi komunikasi politik dalam pengembangan bumdesnya sangat baik dan dalam pengelolaannya semua sudah tertuang dalam peraturan Desa Laweyan no. 3 tahun 2016 tentang pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa “BAMBU REJEKI” dalam anggaran untuk bumdes ini diambil dari APBN 10 % serta dalam pengelolaan dilakukan oleh pemerintah desa sendiri.

Sehingga saat ini bumdes lebih berfokus kepada pertanian dan peternakan yang dikelola oleh desa dengan bantuan masyarakat. Komunikator politik dimana kepala desa sebagai komunikator utama dalam hal pengarahan serta pengambil keputusan selebihnya dalam informasi desa menyerahkan informasi selanjutnya kepada perangkat desa sebagai komunikator kedua dalam komunikasi politik agar informasi atau pesan tersebut tersampaikan kepada masyarakat.

Pesan Komunikasi Politik

Dalam pesan komunikasi politik kepala desa optimalisasi komunikasi politik dalam pengembangan bumdes dimana masyarakat desa laweyan selalu mendukung berjalannya program bumdes tersebut. Oleh karena itu pemerintah desa memberikan akses bagi masyarakat untuk mengelola bumdes atau bekerja sama dalam pengelolaan bumdes. Sehingga dalam pengelolaannya selalu diawasi oleh pemerintah desa itu sendiri. Hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam program tersebut dimana mereka bisa mengeksperesikan pendapat dalam program bumdes tersebut dengan demikian pesan komunikasi politik terhadap optimalisasi komunikasi politik dalam pengembangan bumdes sangat berbuah hasil yang bagus terhadap program bumdes.

Saluran atau media komunikasi politik

Saluran atau media komunikasi politik dalam optimalisasi komunikasi politik kepala desa dalam pengembangan bumdes dimana kepala desa selalu menggunakan dua model komunikasi politik pada media atau saluran diantaranya berupa media online seperti instagram, tiktok, facebook, dll serta media offline seperti sosialisasi secara langsung kepada masyarakat mengenai program bumdes hingga melakukan studi tiru tentang pengelolaan peternakan kambing serta mengsosialisasikan pembuatan pupuk organi dan pakan ternak dalam program bumdes.

Khalayak sasaran atau target komunikasi politik

Target sasaran dalam komunikasi politik ini lebih kepada masyarakat dalam pengelolaan bumdesnya. Sehingga dalam hal ini dapat membuka peluang masyarakat untuk dapat lapangan pekerjaan bagi serta pelatihan bagi masyarakat terutama peternak untuk belajar berternak. Oleh sebab itu pemerintah desa memilih 2 orang dalam pengelolaan bumdesnya dengan memberikan sistem bagi hasil. Pemerintah desa dan pengurus Bumdes selalu seleksi dalam memilih masyarakat untuk merawat kambing-kambing ternak tersebut dari mulai memberikan pakan hingga memberikan obat serta membersihkan kandang dan tubuh kambing. Sehingga dalam optimalisasi komunikasi politik kepala desa dalam pengembangan bumdes dapat mendorong

masyarakat dalam memberikan ekonomi desa yang baik dalam hal mata pencaharian masyarakat sekitar.

Efek Komunikasi politik

Dalam efek komunikasi politik kepala desa merasa kesulitan pada awal terbentuknya bumdes dimana pemahaman masyarakat masih kurang terhadap program bumdes tersebut lambat laun masyarakat mulai paham program dari bumdes tersebut. Dari pengelolaan bumdes tersebut terkendala dalam pakan ternaknya yang dimana penggunaan pakan ternaknya menggunakan rumbut yang bagus jika tidak bagus sangat mempengaruhi kualitas kambing tersebut. Sehingga pemerintah desa dan para pengurus bumdes selalu berinovasi dalam pengembangan bumdes tersebut dengan melibatkan pengurus bumdes yang lama dan baru. Hal ini juga sebagai tantangan bagi pengurus bumdes dalam mengembangkan inovasi-inovasi pada program tersebut dimana mereka harus turun langsung kepada masyarakat dalam membantu pengembangan bumdes.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan yang sudah dilakukan maka hasil dari penelitian ini yaitu yang berjudul optimalisasi komunikasi politik kepala desa laweyan dalam pengembangan bumdes dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa laweyan sendiri selalu berkomitmen dalam pengembangan program bumdes tersebut dari awal terbentuknya pada tahun 2016 hingga saat ini pada tahun 2025. Pemerintah selalu berupaya memberikan sosialisasi secara langsung maupun dalam rapat musdes ataupun studi tiru yang telah dilakukan oleh pemerintah desa laweyan. Sehingga peran masyarakat sangat begitu penting bagi berjalanya program tersebut dan dapat meningkatkan lapangan pekerjaan serta ekonomi yang desa tersebut. Dukungan masyarakat dalam program tersebut sangat mengawal suksesnya program bumdes tersebut. Namun dalam hal pakan ternak hingga obat-obatan semua diserahkan kepada bumdes serta dalam perawatan kambing ternak tersebut diserahkan kepada orang sudah dipilih oleh pengurus bumdes tersebut untuk mengurus peternakan kambing tersebut. Terdapat hambatan dimana kurang pemahaman masyarakat mengenai bumdes pada awal terbentuknya dengan seiringnya waktu masyarakat paham tentang bumdes. Adapun juga hambatan lainnya seperti pakan yang sulit jika musim kemarau dan pada musim hujan pakan ternak tersebut sangat bagus. Dengan pengembangan bumdes tersebut pengurus selalu memiliki inovasi terutama dalam pertanian atau peternakan. Sehingga pemerintah desa selalu berupaya mengembangkan dan meningkatkan perdagangan, bantuan modal kepada para UMKM dan peningkatan kapasitas bumdes agar ekonomi di desa menjadi lebih baik dan sejahtera.

Sesuai dengan hasil penelitian, maka saran yang diberikan penulis harus membangun komunikasi partisipasi dengan warga dengan cara pertemuan bulanan yang melibatkan tokoh masyarakat ataupun masyarakat itu sendiri serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dengan menyertakan laporan terbuka untuk mempublikasikan kegiatan dan keuangan BUMDes. Memanfaatkan platform media sosial dalam memberikan penyaluran informasi mengenai program bumdes serta harus melibatkan generasi muda dalam memberikan informasi promosi produk secara digital dan pengembangan ide yang lebih inovatif.

DAFTAR REFERENSI

- Anugrah Dwi, A. (2023). *Komunikasi politik dan pengaruhnya terhadap opini publik*. Prenadamedia Group.
- Anugrah Dwi. (2023). Komunikasi politik dan contohnya. *Fisip.umsu.ac.id*. <https://fisip.umsu.ac.id/komunikasi-politik-dan-contohnya/#:~:text=Pengertian%20Komunikasi%20Politik,yang%20terlibat%20dalam%20proses%20politik>. Accessed September 27, 2025, at 12:18 PM WIB.
- Cangara, H. (2016). *Pengantar ilmu komunikasi*. Rajawali Pers.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications.
- Haris, A. (2022). Strategi komunikasi politik interaktif di era virtualitas. *Publik Reform*, 9(1), 34–44.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2020). *Pedoman umum badan usaha milik desa*. Kemendesa PDTT.
- Lopulalan, D. L. (2023). Komunikasi politik dalam pemerintahan. *Hipotesa-Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 17(2), 11–22.
- Marjiko, L. A., & Satria. (2020). Implementasi pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. *Pranata Hukum*, 15(2), 199–211.
- Nimmo, D. (2000). *Komunikasi politik: Komunikator, pesan, dan media*. Remaja Rosdakarya.
- Nurhayati, L., & Rukayat, Y. (2021). Optimalisasi peran pemerintah desa dalam pengembangan BUMDes. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 145–158.
- Putra, A. R., & Hermawan, D. (2022). Strategi komunikasi pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 9(1), 55–67.
- Rohman, F. (2020). Penguatan ekonomi desa melalui pengembangan BUMDes. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 4(1), 12–25.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tahir, M. I. (2012). Sejarah perkembangan desa di Indonesia: Desa masa lalu, masa kini dan bagaimana masa depannya. *Jurnal Pemerintahan*, 38.
- Widodo, A. (2021). Peran kepala desa dalam meningkatkan kinerja BUMDes. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 5(3), 210–219.